



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8117-8124

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisa Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut

Irma Rosmayati^{1✉}, Abdul Fatah Hassanudin², Windi Ariesti Anggraeni³, Ade Purnawan⁴

Universitas Garut

Email: i.rosmayati@uniga.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yang terdiri dari 20 kelurahan/desa dengan luas wilayah mencapai 5.207 Ha dengan potensi besar pada hasil pertanian beras di ladang pesawahan, memerlukan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian. Namun, pencapaian target kecamatan masih rendah, khususnya dalam laporan keuangan akhir tahun yang menunjukkan capaian target sebesar 2%. Hal ini disebabkan oleh pemahaman dan keahlian yang belum optimal dalam sistem akuntansi pemerintahan di Kecamatan Karangpawitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntansi pemerintahan di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur, jurnal, dan situs internet terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan di Kecamatan Karangpawitan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No 238/PMK.05/2011, baik pada dana rutin maupun insidental, serta implementasi *good governance* yang telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : *Sistem Akuntansi Pemerintahan, Implementasi good governance.*

Abstract

Karangpawitan Sub-district, Garut Regency, which consists of 20 villages with an area of 5,207 Ha with great potential in rice farming in paddy fields, requires the development of human resources and organizations as a means to improve the economy. However, the sub-district's target achievement is still low, especially in the year-end financial report which shows a target achievement of 2%. This is caused by not yet optimal understanding and expertise in the government accounting system in Karangpawitan Sub-district. This study aims to analyze the implementation of the government accounting system in Karangpawitan Subdistrict, Garut Regency. The research method used is descriptive qualitative with primary data sources from interviews and observations, as well as secondary data from literature, journals, and related internet sites. The results showed that the government accounting system in Karangpawitan Sub-district was in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 238/PMK.05/2011, both on routine and incidental funds, as well as the implementation of good governance that has been running well.

Keywords: Government Accounting System, Implementation of good governance.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian dari perubahan mendasar dengan adanya UU No 32/2004 tentang Perda dan UU No 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah hingga terdapat kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mobilisasi dana, arah, tujuan serta dalam alokasi anggaran. Sedangkan peraturan pemerintah No 8/2006 yaitu laporan keuangan dan kinerja pemerintah menggambarkan sistem akuntansi pemerintahan merupakan langkah sistematis mengenai prosedur, penyelenggara, peralatan, dan lainnya dalam untuk bidang akuntansi pada transaksi hingga laporan keuangan pada organisasi pemerintah. Namun kebijakan akuntansi, jurnal, prosedur, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah terlihat pada data yang tidak sinkronnya, tidak detail dan lengkap. Penyusunan laporan keuangan berdampak kepada penyajian informasi dalam laporan keuangan yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam konsolidasi laporan keuangan pusat dan daerah sehingga memerlukan waktu yang lama (Khusaini, 2022). Kecamatan ini memiliki 20 kelurahan atau desa dengan luas wilayah 5.207 Ha dimana potensi terbesar dari hasil pertanian beras pada ladang pesawahan yang memerlukan pengembangan sumber daya manusia maupun organisasi untuk menjadi wadah peningkatan ekonomi (Apriliani et al., 2022).

Pada aspek pencapaian target kecamatan melalui pengukuran antara target dan realisasi kinerja instansi pemerintah sesuai rencana program sebelumnya. Pada Kecamatan Karangpawitan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Target Capaian Kinerja

Bidang dan Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Diklat Pegawai Fungsi	10,6
Ketersediaan Instalasi Listrik Kantor	1.6
Perlengkapan Kantor	14
Peralatan Rumah Tangga	10
Penggandaan	3
Bahan Bacaan	31
Fasilitas Tamu	11
Rapat Koordinasi	1,9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Peralatan dan lain- lain	9

Sumber : Perbup No 93 Th 2021 Rencana Kerja Karangpawitan. 2022

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa Laporan Keuangan Akhir Tahun prosentase capaian target masih rendah yakni 2%. Hal ini diantaranya disebabkan oleh pemahaman dan keahlian di dalam sistem akuntansi pemerintahan di Kecamatan Karangpawitan yang belum optimal sejalan dengan penelitian (Kakisina, 2020). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa implementasi sistem akuntansi pemerintahan pada kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

Kajian teoritis konseptual ilmu akuntansi pemerintahan melalui pendekatan pemecahan permasalahan yang mendukung pernyataan ilmiah. Akuntansi merupakan aktivitas mengumpulkan, identifikasi, klasifikasi, pencatatan transaksi keuangan berbentuk informasi laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan (Sumarsan, 2013). Akuntansi sangat diperlukan oleh setiap lembaga termasuk di dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Adapun sistem yaitu organisasi unsur, komponen serta variabel yang berinteraksi, bergantung secara terpadu (Sutabri, 2012). Dalam konsep sistem ini ada saling

keterkaitan antar elemen sistem untuk mencapai tujuan, sedangkan sistem akuntansi pemerintahan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No 238/PMK.05/2011 merupakan sistematisasi prosedur, penyelenggara, peralatan, serta lainnya dalam aktivitas akuntansi dari transaksi hingga laporan keuangan organisasi pemerintah. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan dalam prinsip *good government governance* meliputi keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), kontrol/tanggungjawab (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*) yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Beberapa Penelitian sejalan dimana sistem akuntansi pemerintahan memiliki peran pada kualitas laporan keuangan diantaranya Andira et al. (2020), Darma (2019) dan Wardani (2022) yang dilakukan pada objek penelitian tertentu sedangkan penulis melakukan penelitian pada objek Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut dengan segala potensinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2016) yaitu filsafat postpositivisme peneliti pada objek dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan) untuk mendapatkan makna dengan secara rinci dari individu, kelompok atau kejadian. Data kualitatif yang diperoleh dari objek penelitian bentuk lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder dari literatur, jurnal serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian.

Variabel pada penelitian yaitu implementasi sistem akuntansi pemerintahan dengan teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (*field Research*) melalui kunjungan ke objek penelitian untuk mendapatkan bersifat primer maupun yang bersifat sekunder, wawancara (*interview*) serta dokumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan seperti dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan penelitian kepustakaan (*library Research*) melalui upaya menelaah arsip-arsip yang ada pada kantor terkait penelitian, buku-buku, serta jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Sampel pada penelitian ini sistem akuntansi pemerintahan pada Kecamatan Karangpawitan tahun 2022-2023. Teknik analisa data melalui teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada aspek sistem akuntansi pemeritahan berdasarkan hasil wawancara dengan staf kecamatan Karangpawitan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Bagian keuangan kecamatan terdiri dari tiga orang, yakni Kasubag keuangan yang dibantu oleh bendahara dan staf.
- b) Adapun catatan keuangan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 dan awal tahun 2023 yang berkisar seputar Bantuan Dana ADD yakni Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD), selanjutnya ada DD yaitu Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan IP atau Infrastruktur Desa sebagai Bantuan Gubernur (BanGub) atau IP dimana Tiap tahun Desa di seluruh Jawa Barat mendapat bantuan keuangan dari provinsi.
- c) Adapun untuk dana rutin setiap bulan untuk penyelenggaraan kecamatan dalam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh kecamatan sesuai dengan anggaran yang tercantum pada SIPD dan amanat undang-undang 23/2014 tentang Perencanaan pembangunan Daerah atas dasar informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yakni sistem pendokumentasian, pengelolaan dan pengolahan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai dokumen pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- d) Selanjutnya sistem akuntansi pemerintahan kecamatan berkaitan dengan prosedur pelaporan keuangan diawali dengan laporan dari bendahara selanjutnya kepada kasubag keuangan dan kasubag umum. Setelah proses ini, dilanjutkan pada Camat untuk dilaporkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) yakni Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD), merger/penggabungan antara Bagian Perlengkapan Setda dan BPKD.
- e) Sistem akuntansi pemerintahan kecamatan berkaitan dengan Permohonan pencairan dana rutin, berkas format pengajuan dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah terdapat pada SIPD dengan ajuan Ganti Uang yang di ajukan ke DPPKA bagian perbendaharaan yang selanjutnya di proses dengan pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar) ke BJB (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk) untuk pencairan yang dapat diambil oleh bendahara dan camat dengan rutin setiap bulan dan

pencairan dalam waktu 3 hari.

- f) Penyelenggaraan pelaporan keuangan dilakukan dengan Surat pertanggung jawaban melalui Buku Kas Umum (BKU). BKU adalah suatu buku yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas melalui bendahara pengeluaran yang memuat antara lain Surat pesanan, bon, dst yang diserahkan Ke DPPKA pada bagian pembukuan dengan peralatan pelaporan keuangan lainnya seperti SIP Rencana Kerja, anggaran dan sebagainya. Selanjutnya dari DDPKA pelaporan di teruskan pada Bupati.

Sistem akuntansi pemerintahan yang berkaitan dengan empat prinsip implementasi *good goverment* yang meliputi keadilan (*fairness*), tranparansi (*transparency*), kontrol/tanggungugat (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*) adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan (*fairness*) dengan kemampuan untuk bersikap dan bertindak yang dapat diterima dan didukung secara timbal balik sudah terdapat di dalam TKD (tunjangan kinerja daerah) dan lomba kinerja yang biasanya diselenggarakan pada hari tertentu seperti hari jadi kabupaten Garut yang dapat berupa promosi jabatan.
- b. Tranparansi (*transparency*) dalam bentuk keterbukaan dan pertanggung-jawaban dalam sistem akuntansi pemerintahan kecamatan Karangpawitan, melalui hasil wawancara terdapat hanya pada lingkup bendahara, kasi / kasubag keuangan, kasi yang lain dan Camat.
- c. Kontrol/tanggungugat (*accountability*) sistem akuntansi pemerintahan kecamatan Karangpawitan dalam faktor akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik pada SIPD kepada DPPKA, sedangkan pada ruang lingkup tahunan dari inspektorat ke kecamatan- kecamatan yang meliputi Camat, Bagian keuangan dan Sekmat.
- d. Tanggungjawab (*responsibility*) pada Kecamatan karangpawitan keadaan wajib menanggung segala tugasnya dan sikap terbuka dengan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam menjalankan berupa catatan- catatan bagi inspektorat sedangkan pada ruang lingkup internal kecamatan kewenangan Sekmat memanggil kasubag keuangan untuk pertanggungjawaban. Namun sejauh ini tanggung jawab maupun pertanggung jawaban tidak ada kendala- kendala yang dapat mengakibatkan adanya sanksi.

Kendala dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan berkaitan dengan empat prinsip implementasi *good goverment* yaitu keadilan (*fairness*),

tranparansi (*transparency*), kontrol/ tanggunggugat (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*) yang mengakibatkan target capaian kinerja tidak optimal disebabkan oleh faktor- faktor anggaran yang tidak maksimal, sumber daya manusia yang tidak linier dengan job description dan kelengkapan sarana termasuk suasana gedung kantor kecamatan yang masih memerlukan penataan serta prasarana barang-barang elektronik untuk menunjang tugas rutin sehari-hari yang masih belum memadai.

SIMPULAN

Penelitian mengenai Analisa Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintahan pada Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut pada unsur- unsur sistematika prosedur, penyelenggara, peralatan, serta lainnya dalam aktivitas akuntansi dari transaksi hingga laporan keuangan organisasi pemerintah sudah sesuai begitu pula implementasi Sistem akuntansi pemerintahan yang berkaitan dengan empat prinsip implementasi good government yang meliputi keadilan (*fairness*), tranparansi (*transparency*), kontrol/ tanggunggugat (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*) pada umumnya sudah terselenggara dengan baik.
2. Kendala-kendala dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan berkaitan dengan empat prinsip implementasi *good goverment* yaitu keadilan (*fairness*), tranparansi (*transparency*), kontrol/ tanggunggugat (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*) yang mengakibatkan target capaian kinerja tidak optimal disebabkan oleh faktor- faktor anggaran yang tidak maksimal, sumber daya manusia yang tidak linier dengan job description dan kelengkapan Sarana termasuk suasana gedung kantor kecamatan yang masih memerlukan penataan serta prasarana barang-barang elektronik untuk menunjang tugas rutin sehari-hari yang masih belum memadai.

Adapun rekomendasi/ saran, antara lain:

1. Mengingat adanya hambatan dalam faktor- faktor anggaran yang tidak maksimal, sumber daya manusia yang tidak linier dengan *job description* dan kelengkapan Sarana termasuk suasana gedung kantor kecamatan yang masih memerlukan penataan serta prasarana barang-barang elektronik untuk menunjang tugas rutin sehari-hari yang masih belum memadai.
2. Pada aspek transparasi dalam bentuk keterbukaan dan pertanggung-jawaban

dalam sistem akuntansi pemerintahan Kecamatan Karangpawitan hanya pada lingkup bendahara, kasi/kasubag keuangan, kasi yang lain dan camat maka disarankan agar pada bagian ada keterbukaan untuk bagian- bagian lain dalam struktur organisasi kecamatan Karangpawitan oleh karena pandangan holistik bagi terwujudnya tujuan setiap unsur memiliki tanggung jawab dan peran yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, A., Silalah, A. D., & Dewi, R. S. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 533–535.
- Apriliani, D., Fawwaz N.M, Nurhasanah, & Irwansyah F. S. (2022). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Potensi Masyarakat Kampung Nangoh Desa Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(46), 100–121. Retrieved from <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/862>
- Darma, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Tanjungbalai* (Doctoral Dissertation). Universitas Sumatera Utara.
- Kakisina, S. M. (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pembnas (Jam Pembnas)*, 7(1), 53–62.
- Khusaini. (2022). Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian LKPK pada Kanwil DJPB. Retrieved October 14, 2023, from [djpb.kemenkeu.go.id website: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikapung/id/data-publikasi/artikel/3022-permasalahan-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-konsolidasian-lkpk-pada-kanwil-djpb.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikapung/id/data-publikasi/artikel/3022-permasalahan-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-konsolidasian-lkpk-pada-kanwil-djpb.html).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen* (2nd ed.). Jakarta: PT Indeks Jakarta.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Wardani, W. (2022). *Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Aplikasi Sipd Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang* (Laporan Kuliah Kerja Magang).